

Stigma Partai dan Presentasi Diri Para Politisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Lely Arrianie*

*Universitas Bengkulu

ARTICLE INFO

Keywords:
Stigma parties, Politicians,
Self-presentation

email:
lely.arrianie@gmail.com

Jurnal Communicate
Volume 1 Nomor 1
Juli-Desember 2015
ISSN. 2477-1376
hh. 1-12

ABSTRACT

Election of powerful politicians to parliament as leaving a question mark after powerful politicians captivated politicians who incidentally is a former student organizations and youth activists who previously gave great hope to change the face of parliament and the bureaucracy in Indonesia. When the alleged or suspected, the public and even linking them with the party's fault, and it displays the party seems to be a stigma corrupt party, even if the perpetrator is an individual of the party. This research was conducted with the phenomenological approach and interaction with the dramaturgical symbolic and interpretive qualitative analysis. This study is actually able to provide implications for institutions to organize and put anyone in the position of the suspect and his or attached a stigma to be treated fairly in comparison to what is experienced by those who have similar status, but they are not of the elite. Stigma of political party organization which is the effect of the enactment of the top cadres and the status of the suspect or his party elite or less will be able to degrade the party.

Keterpilihan politisi handal ke parlemen seolah menyisakan tanda tanya pasca terjeratnya politisi-politisi handal yang notabene adalah mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemimpinan yang sebelumnya memberikan harapan besar untuk perubahan wajah parlemen dan birokrasi di Indonesia. Saat diduga atau disangkakan, publik bahkan mengkaitkan kesalahan mereka dengan partai, dan itu menampilkan stigma partai seolah menjadi partai korup, meski pelakunya adalah individu dari partai. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik serta dramaturgis dengan analisis interpretif kualitatif. Penelitian ini sejatinya mampu memberikan implikasi bagi lembaga terkait untuk menata dan menempatkan siapapun yang dalam posisi tersangka dan atau dirinya melekat sebuah stigma untuk bisa diperlakukan adil dibandingkan dengan apa yang dialami oleh mereka yang menyandang status yang sama tetapi mereka bukanlah dari kalangan elit. Stigma organisasi partai politik yang merupakan efek dari ditetapkannya status tersangka atas kader dan atau elit partainya sedikit banyak akan dapat mendegradasi partai.

©2015 JC. All rights reserved.

Pendahuluan

Keterpilihan politisi handal ke parlemen seolah menyisakan tanda tanya pasca terjeratnya politisi handal yang notabene adalah mantan aktivis organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan yang sebelumnya memberikan harapan besar untuk perubahan wajah parlemen dan birokrasi di Indonesia, apalagi jika politisi tersebut berlatar belakang partai yang diduga mungkin saja sangat mengedepankan isu moral, anti korupsi dalam platform partainya sehingga gambaran tentang keberadaan mereka di parlemen seharusnya mampu menawarkan dan memberikan harapan baru bahwa merekalah yang menjadi penggerak roda parlemen yang bersih dan jauh dari perilaku politik yang mengecewakan rakyat.

Dahlström (2012) berpendapat bahwa dalam birokrasi, semangat kelompok akan menghasilkan serangkaian norma-norma umum, mendorong perilaku berpihak dan tidak korup. Akan tetapi apa yang dialami Anas Urbaningrum yang mantan ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu, dan kemudian menjadi ketua partai yang mengusung slogan “katakan tidak pada Korupsi”? atau apa yang terjadi pada Patrice Rio Capella yang mantan Sekjen Nasdem yang mengusung slogan “Restorasi Indonesia” dimana sebelumnya Rio juga malang melintang di organisasi kemahasiswaan seperti HMI dan organisasi Kepemudaan KNPI sebelum ia terjun ke partai Politik Golkar, lalu pindah ke PAN dan terakhir ke NASDEM, sejatinya telah memberikan bekal pendidikan dan pembelajaran politik yang seharusnya menjadi tameng bagi dirinya untuk makin membuat dirinya bersinar di panggung politik dan media tapi terus mengakar ke publik dan justru bukan menenggelamkan karir politiknya yang dibangun puluhan tahun dengan susah payah itu. Namun dikarenakan godaan terhadap pemenuhan kebutuhan pribadi yang jauh dari harapan konstituen nampaknya lebih menarik dipenuhi dalam kapasitas diri yang seharusnya menjadi penyambung bagi suara rakyat.

Tanzi mengemukakan korupsi sektor publik didefinisikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Lalountas, *et al*, 2011). Lain halnya pendapat (Salinas-Jiménez & Salinas-Jiménez, 2007) Korupsi umumnya dikaitkan dengan buruknya kualitas lembaga dan sektor publik berfungsi menjadi politisi dengan identitas baru sekelas pejabat tinggi negara bagi anggota DPR RI nampaknya, mampu mengubah gaya hidup dalam seremonial politik dan pesta kenegaraan dan dalam kedudukan pribadi sebagai individu politisi

dan politisi partai. Kedudukan di partai yang nyaris setara dengan elit eksekutif menyebabkan posisi tarwar politisi makin bergigi dipanggung rapat-rapat yang digelar di parlemen, di komisi-komisi yang mempertaruhkan anggaran atau di arena *fit and proper test* bagi calon pejabat publik, tidak heran jika kesempatan untuk bermain dalam berbagai peran yang menentukan itu bisa disalahgunakan. Entah atas nama individu, atau bahkan atas nama partai sekalipun sehingga dalam kapasitas itulah mereka bisa masuk ke wilayah eksekutif bahkan yudikatif. Sehingga temuan beberapa penggiat anti korupsi seperti ICW dan lembaga pemantau parlemen seperti FORMAPPI yang mengisyaratkan adanya penyimpangan peran politisi seperti menjadi “calo” anggaran dan jabatan dan lainnya seolah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kerja politisi yang kemudian menyeret mereka ke dalam berbagai kasus yang di tangani oleh KPK.

Data menunjukkan bahwa sampai 2015 lebih dari 40 politisi DPR RI yang terjerat kasus korupsi ditambah dengan ratusan politisi parlemen daerah seperti DPRD Propinsi, Kabupaten dan Kota, memberikan gambaran bahwa tidak ada politisi dengan berbagai latar belakang partai yang bahkan berbasis agama sekalipun, nasionalis atau restoratif itu yang steril dari korupsi sehingga citra partai, reputasi individu dan partai seolah terdegradasi ke dalam stigma yang bertolak belakang dari slogan partai dan bahkan platform yang diusung oleh partai tersebut. Di banyak negara, menurut Tanzi bahwa uang yang dikumpulkan dari korupsi digunakan untuk membiayai partai politik (Lalountas *et.al*, 2011). Dengan merusak tujuan intervensi pemerintah ke dalam perekonomian, korupsi adalah penyebab utama kegagalan pemerintah (Acemoglu & Verdier, 2000). Sedangkan menurut Goel & Nelson (2010) faktor sejarah, pengaruh geografis serta ukuran dan ruang lingkup pemerintah juga dapat mempengaruhi tingkat korupsi.

Citra partai yang terdegradasi ke dalam stigma negatif akan berdampak luas pada perkembangan partai ke depan pada partai membutuhkan citra positif. Sebagai pengalaman yang membutuhkan tempat pada benak tiap orang (Vos: 92) partai adalah organisasi atau lembaga yang seharusnya reputasinya dijaga oleh tiap individu yang bergabung di dalamnya terlepas apakah dia merupakan kader yang telah membangun partai sejak dari awal atau yang datang belakangan ketika partai menjadi besar. Konsep reputasi inilah yang seharusnya juga bisa dikaitkan oleh tiap politisi yang masih menginginkan keberadaannya di partai tidak tercerabut

oleh perilaku politiknya yang menodai nama baik atau nama besar partai politik yang mengusungnya sehingga bisa melenggang ke panggung politik.

Morley (2002) bahkan menggaris bawahi pengelolaan reputasi organisasi dapat didefinisikan sebagai sebuah orkestra yang dirancang untuk mempromosikan dan melindungi *brand* organisasi termasuk nama baik organisasi itu, baik, buruk, kuat atau lemah tergantung pada kualitas pemikiran dan strategi serta komitmen pengurus untuk mencapai tujuan yang ditetapkan serta adanya ketrampilan dan kemampuan serta energi dengan segala komponen program yang akan direalisasikan oleh organisasi dan dikomunikasikan kepada rakyat. Meskipun presentasi diri melekat, tidak selalu berkaitan dengan persepsi publik terhadap mereka (Leary & Ashley, 2011).

Jadi esensinya, harus ada program yang senyawa yang bisa dan harus digagas oleh organisasi partai politik dengan peran yang akan dipentaskan oleh aktor politiknya atau politisi partainya di parlemen, program yang selaras untuk membangun citra dan reputasi partai itu akan membantu partai untuk tidak terjerembab ke dalam stigma yang justru merugikan perkembangan dan pertumbuhan partai ke depan, sehingga tetap bisa mendapatkan respon positif di mata orang-orang yang membutuhkan organisasi partai untuk menjadi wadah menyampaikan aspirasi politiknya. Dan di sanalah peran politisi partai baik yang duduk di parlemen maupun yang menjadi fungsionaris, atau pengurus partai untuk bisa menghadirkan ruh positif atas kinerja partai yang menunjukkan presentasi diri positif di parlemen dan pemerintahan.

Akan tetapi idealistis politik semacam itu kemudian dinodai oleh mereka yang notabene kader, pengurus, atau ketua partai yang duduk di legislatif dan eksekutif yang menjadi pesakitan di KPK, bahkan sekelas Surya Dharma Ali yang mantan Ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun tak luput dari jerat korupsi meski ia tak duduk di legislatif karena menduduki jabatan eksekutif sebagai Menteri Agama saat perbuatan korupsi yang dituduhkan kepadanya dilekatkan oleh KPK. Anas Urbaningrum juga diseret KPK saat ia tak lagi duduk di legislatif tapi menjalani perannya sebagai ketua Partai Demokrat dan Andi Malarangeng juga adalah elit Partai Demokrat yang tengah menduduki jabatan eksekutif sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga saat KPK menyeretnya sebagai tersangka. Pada tata kelola yang baik, para ilmuwan sering membahas kendala normatif korupsi dengan mem-

bahas konsep-konsep seperti masyarakat sipil, nilai-nilai moral, media, dan kadang-kadang budaya (Pippidi, 2013). Adapun Stockemer (2011) dampak negatif korupsi terhadap partisipasi demokratis telah banyak dibahas oleh para ilmuwan melalui jejak pendapat. Salah satunya ada bukti bahwa korupsi dapat mengganggu demokrasi karena merusak prinsip-prinsip dasar negara bebas. Hal ini banyak mencatat bahwa korupsi memberikan kontribusi terhadap delegitimasi sistem politik dan kelembagaan (Rock, 2009; Sung, 2004)

Akan tetapi ironi peran semacam ini seolah tidak membuat para pelaku tindak pidana korupsi itu kecut berhadapan dengan publik dan kamera, senyum tak berdosa seolah menjadi bagian dari upaya mengelabui keadaan yang tengah menjerat mereka. Sehingga tampilan mereka tetap bak selebritis yang berdandan rapi seperti saat mereka dicari banyak media, meski mereka telah berubah dalam kedudukan dan posisi yang berbeda. Presentasi diri semacam ini menjadi bagian dari upaya yang tidak kalah berat, karena mereka sebenarnya tengah berkamufase untuk mempresentasikan diri mereka yang berbeda tapi seolah dibuat sama dibandingkan dengan presentasi diri saat mereka dipuja dan dipuji sebagai politisi dan pejabat di pemerintahan.

Tunnell menyatakan orang yang memiliki kesadaran diri yang tinggi terhadap publik menunjukkan perbedaan sikap untuk menjaga presentasi diri terhadap orang lain agar presentasi diri mereka tidak menyimpang jauh dan dapat melihat mereka sendiri (Leary & Ashley, 2011). Oleh karena itulah maka menjadi menarik mengkaji bagaimana presentasi diri itu tersajikan ke publik, sebagai bagian dari upaya untuk mendeskripsikan interpretasi mereka tentang kapasitas mereka setelah tersandung kasus korupsi dan interaksi simbolik mereka setelah menjadi pesakitan di KPK sehingga bagaimana mereka melihat dan merasakan langkah politik mereka menjadi berubah dari sebelum dan sesudah mereka berhasil meraih kedudukan sebagai politisi atau pejabat publik tersebut.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan fenomenologi dan interaksi simbolik serta dramaturgis dengan analisis interpretif kualitatif, meskipun ada banyak pendekatan yang dapat dilakukan jika dilihat dari *social establishment* interaksi simbolik misalnya berdasarkan perspektif teknis (melihat lembaga dari sudut efisiensinya), Perspektif politis (dari sudut tuntutan), perspektif struktural (statusnya) dan perspektif kultural (model lembaganya), pene-

litian ini juga bersandar pada salah satu dari *social establishment* dari pendekatan interaksi simbolik yaitu melihat lembaga dari perspektif dramaturgis (peran politisinya).

Lindlof (1995) menyebutkan bahwa metode kualitatif untuk penelitian komunikasi dengan paradigma fenomenologi, etnometodologi, interaksi simbolik, etnografi dan studi kultural sering disebut sebagai paradigma interpretif (*interpretive paradigm*). Mulyana (2001) menyebutnya sebagai perspektif subjektif yang memiliki ciri sebagai berikut: (1) Sifat realitas: Realitas komunikasi bersifat ganda, rumit, semu, bersifat dinamis (mudah berubah) dikonstruksikan dan holistik; kebenaran realitas bersifat relatif. (2) Sifat manusia (komunikator atau peserta komunikasi): Aktor (komunikator) bersifat aktif, kreatif dan memiliki kemauan bebas; perilaku komunikasi secara internal dikendalikan oleh individu. (3) Sifat hubungan dalam dan mengenai realitas (komunikasi): Semua entitas secara simultan saling memengaruhi, sehingga peneliti tidak mungkin membedakan sebab dari akibat. (4) Hubungan antara peneliti dan subjek penelitian: Setaraf, empati, akrab, interaktif, timbal balik, saling memengaruhi dan berjangka lama. (5) Tujuan penelitian: Menangani hak-hak yang bersifat khusus, bukan hanya perilaku terbuka, tapi juga proses yang tak terucapkan, dengan sampel kecil, memahami peristiwa yang punya makna historis, menekankan perbedaan individu, mengembangkan hipotesis, teori yang terikat oleh konteks dan waktu, membuat penilaian etis/estetis atas fenomena komunikasi spesifik. (6) Metode penelitian deskriptif (wawancara tak berstruktur dan mendalam, pengamatan berperan serta) analisis dokumen, studi kasus, studi historis; penafsiran sangat ditekankan alih-alih pengamatan objektif. (7) Analisis: Induktif; berkesinambungan sejak awal hingga akhir, mencari model, pola atau tema. (8) Kriteria kualitas penelitian: Otentitas, yakni sejauh mana temuan penelitian mencerminkan penghayatan subjek yang diteliti (komunikator), dan (9) Peran nilai: Nilai, etika dan pilihan moral peneliti melekat dalam proses penelitian (pemilihan masalah penelitian, tujuan penelitian, paradigma, teori dan metode/teknik analisis yang digunakan, dsb).

Penelitian ini menyediakan sejumlah teori untuk memahami fenomena yang dikaji, meskipun sebagai peneliti kualitatif teori, bukanlah sebuah dasar yang penting karena teori bisa saja ditetapkan dan diubah ketika peneliti berada di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tampil menarik ala politisi pasca menjadi pesakitan KPK, tentu menyisakan pertanyaan yang menarik diurai satu demi satu jawabannya oleh politisi sebagai individu yang presentasi dirinya diterjemahkannya sendiri sebagai subjek sekaligus objek. Di panggung politik dan pemerintahan ia adalah subjek yang bahkan semua pesan politik yang dikomunikasikannya bebas menjadi rujukan untuk mengatur kebijakan dan eksekusinya terutama yang berkaitan dengan kepentingan rakyat banyak, tetapi referensi perilaku itu drastis berubah pasca terjadi perubahan identitas mereka dari yang semula sebagai orang yang sangat terhormat lalu berubah menjadi orang yang kebebasannya dibatasi oleh terali besi dan penjara KPK, yang tempat duduknya hadir di sidang tindak pidana korupsi (TIPIKOR) dari yang semula kursi empuk parlemen dan menteri, deputi bahkan ruang ber AC dingin yang kadang membuat mereka tidur sambil rapat saking sejuknya.

Realitas yang mereka hadapi sebagai terduga, tersangka dan terdakwa serta merta membalikkan semua keadaan mereka yang semula bergelimang pujaan dan pujian, penghormatan, loyalitas, dukungan dan bahkan pertemanan politik yang seolah akrab tapi semu berakhir sudah, satu demi satu teman menjauh, dukungan berkurang, loyalitas hilang, pujian terbang dan pemujaan terhadap kapasitas diri mereka pun lenyap kecuali oleh mereka yang terikat hubungan darah atau perkawinan, selebihnya seolah memberi jarak atas relasi dengan keberadaan mereka pasca beralih status.

Pada hakekatnya tiap manusia bukanlah “barang jadi” melainkan sebagai barang yang “akan jadi” karenanya teori interaksi simbolik membahas pula konsep mengenai: Diri, diri sosial, termasuk pengendalian diri perspektif orang lain, interpretasi dan makna-makna lain yang muncul dalam interaksi tersebut. Ada tiga premis yang dibangun dalam interaksi simbolik yaitu bahwa (i) Manusia bertindak berdasarkan makna-makna; (ii) Makna tersebut didapatkan dari interaksi dengan orang lain; (iii). Makna tersebut berkembang dan disempurnakan ketika interaksi tersebut berlangsung. (Mulyana, 2001)

Pada setiap aksi dan interaksi manusia yang menggunakan bahasa, isyarat dan bermacam-macam simbol maka kita dapat mendefinisikan dan sekaligus melakukan interpretasi dan analisis sekaligus memperlakukan sesuai dengan kehendak kita. Inilah keunikan teori interaksi simbolik ini, bahwa apabila di satu pihak terdapat kebebasan manusia

seperti yang dicita-citakan dalam interaksi simbolik, di pihak lain akan ada batasan terhadap definisi orang lain, mengenai diri kita sendiri. Dalam interaksi simbolik keduanya berpadu secara khas dan selaras.

Teori interaksi simbolik menggunakan paradigma individu sebagai subjek utama dalam percaturan sosial, meletakkan individu sebagai pelaku aktif dan proaktif. Inilah kompromi teori ini terhadap teori lain yang mungkin mengesampingkan keberadaan dan kemampuan individu untuk menginterpretasikan fakta lingkungannya. Pun termasuk memaknai seluruh tindakan bahkan sekaligus mengkonstruksi alam kehidupan kebersamaannya secara kolektif dengan masyarakatnya lewat aksi dan interaksinya yang komunikatif.

Pada dasarnya teori interaksi simbolik menegenahkan soal diri sendiri (*the self*) dengan segala atribut dunia luarnya. Cooley (Downey, 2015) menyebutnya sebagai *looking glass self*. Artinya dalam setiap interaksi manusia selalu dipenuhi dengan simbol-simbol dan interaksi baik dalam kehidupan sosial maupun kehidupan diri sendiri, dengan demikian maka teori interaksi simbolik tidak lain merupakan cara pandang yang memperlakukan individu sebagai diri sendiri sekaligus diri sosial. Dalam realitasnya cara pandang diri sendiri dan sekaligus diri sosial yang dikenakan kepada para tersangka tindak pidana korupsi yang dicitiduk KPK akan sangat tergantung pada bagaimana diri individu tadi mempresentasikan dirinya di hadapan orang lain dalam status sosial dirinya yang berubah tadi, meski ada banyak persepsi yang berseliweran dan mengganggu kapasitas dirinya yang memang telah berubah mereka tetap harus menampilkan sikap seolah mewakili jawaban kebanyakan tersangka atas pertanyaan publik tentang perilaku dan korupsi politik yang mereka lakukan.

Menurut pandangan interaksi simbolik, manusia dipandang sebagai pelaku, pelaksana, pencipta dan pengarah bagi dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk yang memiliki jiwa dan semangat bebas dilihat dari kualitas manusia yang tercipta secara sosial. Suprpto (2002) memberi kesimpulan tentang bagaimana interaksi simbolik mengungkap konsep "bebas" dalam hal ini: (1) Banyak orang berpendapat bahwa "aku" (*the I*) dalam diri seseorang adalah orang yang bebas. "Aku" berarti bahwa kita terlibat dalam tindakan yang tidak direncanakan. (2) Adalah saya (*Me*), diri sendiri yang dianggap merupakan sumber kebebasan manusia. Dengan memberikan konsep diri sendiri (*the self*) pada manusia,

sekedar insting atau kebiasaan yang membawa kita melewati suatu situasi sosial. (3) Simbol-simbol yang juga merupakan sumber kebebasan manusia. Sehingga manusia bukan kadang-kadang saja kreatif, tetapi akan selalu kreatif dalam setiap situasi. (4) Manusia akan berubah secara konstan dan menyesuaikan diri secara konstan pula.

Menurut paham interaksionisme simbolik pula bahwa tindakan tidak selalu diarahkan pada diri sendiri, namun juga ada alternatif-alternatif lain, seperti emosi, luapan perasaan dan kebiasaan-kebiasaan lain. Hal ini membawa kita pada respon yang dilakukan tanpa berpikir, tanpa pemecahan masalah, tanpa mempertimbangkan masa lalu dan masa depan, tanpa pengambilan peran.

Ada faktor-faktor emosi dan kebiasaan terhadap apa yang kita lakukan, pada tingkat tertentu kita sangat bergantung pada faktor-faktor ini dalam tindakan kita. Kita tidak bebas karena kebebasan selalu ada batasnya, meskipun simbol selalu dianggap sebagai sumber kebebasan manusia, sangat terpengaruh oleh respon emosional atau kebiasaan. Bahkan, ketika seseorang tidak mampu mengatasi situasi secara efektif atau variabel-variabel baru lainnya dalam setiap situasi, tidak mampu berinteraksi dengan orang lain, tidak mampu mengambil peran, tidak mampu bekerjasama berkenaan dengan situasi-situasi yang kompleks, bahkan tidak mampu berkomunikasi secara efektif, maka seseorang akan selalu dikejutkan dengan hal-hal yang seseorang lakukan termasuk ketika kita menyadari bahwa kita kreatif, impulsif dan spontan baik sebagai aku (*the I*) maupun saya (*me*). Artinya, kebebasan manusia selalu akan dibatasi dan terbatas oleh bahasa maupun simbol-simbol kita yang lain. Kita hanya bisa bebas di dalam sistem simbolik kita sendiri.

Namun demikian, batasan-batasan ini seharusnya tidak membuat seseorang kehilangan pandangan akan kebebasan manusia itu sendiri. Barangkali, lebih baik kita menyebutnya sebagai "alam aktif kita", yakni manusia tidak merespon situasi-situasi, namun secara aktif terlibat dalam definisi dan arah diri sendiri dalam situasi-situasi ini. Meskipun kebebasan menjadi perbincangan dalam teori interaksi simbolik, selalu terdapat ukuran atas nilai kebebasan itu sendiri.

Ada beberapa parameter yang seharusnya menjadi pertimbangan, yaitu: (1) Suatu situasi biasanya menghadapkan kita pada apa yang harus kita definisikan termasuk di dalamnya menyangkut pada sejumlah kelebihan dan kekurangan yang kita miliki.

(2) Setiap perilaku, kegiatan atau tindakan seringkali berangkat dari situasi internal/eksternal yang terjadi pada kita sehingga seringkali muncul sebuah tindakan yang kemudian kita lakukan tanpa memperhitungkan kontribusi pikiran dan keinginan untuk memecahkan masalah itu sendiri termasuk di luar pertimbangan masa lalu dan masa depan sehingga komunikasi yang kita lakukan juga menjadi tidak efektif. (3) Masyarakat seringkali menjadi tolak ukur atas tiap tindakan yang kita lakukan, artinya terjadi batasan kebebasan, termasuk kreatifitas individu atas interaksi yang dilakukan. (4) Ketika kita berada dalam suatu sistem simbolik yang sama, maka kemampuan menganalisis simbol lain menjadi terbatas dan untuk itu maka menjadi sangat penting untuk menganalisis berbagai perspektif sehingga kita pun dapat menjadi lebih kritis atas segala sesuatu yang berbeda (Riyadi, 2002).

Interaksi simbolik bersikap kritis terhadap ilmu pengetahuan tradisional dalam metodologi dan definisinya tentang hubungan sebab akibat atas variabel-variabel yang penting. Mengetahui bagaimana manusia mendefinisikan situasi, bagaimana mereka bertindak di masa kini dengan menerapkan pengalaman masa lalu dan rencana masa depan, bagaimana mereka menghubungkan tindakan mereka, dan bagaimana mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Karena itu pandangan ini juga memberi ruang diskusi yang bermakna tentang bagaimana presentasi diri para tahanan KPK terkait dengan tudingan, cemooh dan bahkan ketidakhayamanan rekan separtainya yang menyebut mereka telah menceraibut nama baik partai dengan stigma yang menakutkan bagi orang lain untuk berempati apalagi bersimpati dengan partainya. Tetapi di pertemuan singkat antara sorot kamera dan jalan antara KPK sampai ruang tahanan para tersangka seolah menyajikan presentasi diri yang dikendalikan sedemikian rupa. Goffman (1963) menyatakan bahwa justru banyak orang berinteraksi di pertemuan singkat itu. Disini pun orang menurut Goffman tetap berhati-hati mengendalikan kesan yang diberikan kepada orang lain yang terlibat dalam situasi singkat tersebut.

Goffman (1963) tertarik untuk menjelaskan pengendalian kesan dari mereka "yang direndahkan" atau "yang dapat direndahkan." Karena status yang mereka sandang, ini berlaku juga terhadap organisasi dimana orang-orang tersebut berkegiatan. Namun yang sangat terkait dengan penelitian ini adalah kajian Goffman tentang mereka yang kekurangannya tidak terlihat secara langsung untuk mengikuti standar penerimaan sosial (Goffman, 1966). Inilah

hal yang paling menarik, unik dan argumentatif jika kita kaitkan dengan interaksi politisi yang tentunya berasal dari berbagai partai politik yang mungkin secara ideologis memang berbeda. Serta standar lain yang tidak serta merta terlihat publik dalam kapasitas mereka sebagai politisi yang mewakili konstituennya, lalu berubah menjadi politisi yang menyandang gelar pesakitan.

Goffman (1963) mengemukakan bahwa ketika mengamati cara individu menangani sebuah informasi maka dapat dilihat kelemahan mereka masing-masing. Adalah sebuah kenyataan bahwa para politisi pelaku tindak pidana korupsi baik yang masih menjadi tersangka atau yang telah menjadi terdakwa dihadapkan pada berbagai situasi yang sarat perdebatan yang kreatif dan argumentatif, tetapi meski secara simbolis para politisi tahanan KPK itu mengemas penampilan mereka dengan baju berjas dan berdasi.(meski dilapisi rompi tahanan KPK) Tetap saja mereka tidak dapat diamati dengan mata telanjang tanpa menelaah proses komunikasi yang mereka pertukarkan. Ketika itulah sesungguhnya dapat diklasifikasikan standar kemampuan atau pengetahuan, etika, sikap sang politisi yang diperankannya di panggung yang telah berubah itu.

Bagi Goffman (1963) aib seseorang bukan sesuatu yang abnormal karena berasal dari berbagai situasi: "Aib tidak seperti individu konkret yang dapat dibagi dalam dua bagian, yang punya aib dan yang normal. Yang aib dan yang normal itu bukan manusia tapi perspektifnya." Namun karena setiap orang akan berhadapan dengan aib maka orang harus mengambil langkah kongkrit untuk mengatur dan memperlemah identitas yang jelek itu.

Jika pemahaman Goffman ini dikenakan pada individu dan kelompok politisi pelaku tindak pidana korupsi yang ditahan KPK itu, maka siapapun dapat berargumentasi tentang maraknya kasus korupsi dikalangan politisi, korupsi berjamaah (meminjam istilah Syafii Ma'arif, mantan ketua PP Muhammadiyah itu) yang melibatkan anggota DPR RI dan hampir semua anggota DPRD di setiap Provinsi atau Kabupaten dan Kota. Stigma itu adalah salah satu standar penerimaan sosial yang langsung terlihat. Seperti apa yang disinyalir Goffman bahwa yang aib dan yang normal itu bukan manusianya tapi persepektifnya. Maka mungkin ini pula yang terjadi pada kasus Anas Urbaningrum, Surya Dharma Ali, Jero Watjik, Angelina Sondakh, Dewie Yasin Limpo, Wa Ode Ida, dan Patrice Rio Capella, Sutan Batugana dan beberapa politisi tersohor lainnya. termasuk juga beberapa ketua dan anggota DPRD

yang sempat ditahan atas tuduhan korupsi, namun tetap dapat melenggang di gedung dewan, bahkan beberapa diantaranya menjadi calon anggota legislatif nomor jadi untuk pemilu pada 2004, 2009 dan 2014 dan terpilih kembali.

Tujuan interaksi simbolik sebagai perspektif ilmiah adalah untuk mengerti apa penyebabnya. Penyebab tersebut akan ditransformasikan pada alat definisi manusia, arah diri sendiri dan pilihan dalam situasi. Mengerti bagaimana manusia berpikir, memecahkan masalah, mengambil peran, menerapkan masa lalu mereka dan melihat masa depan dalam situasi. Bahwa bagian dari tindakan manusia adalah pilihan, merupakan proses kreatif dan bebas. Jadi meski mereka tidak lagi memiliki kebebasan untuk berimajinasi dan berekspresi politik di panggung politik depan. Mereka tetap punya hak menjaga ritme perilaku yang boleh bertentangan dan boleh tidak dengan opini dan persepsi publik atas kasus yang mereka hadapi.

Ketika Manford H. Kuhn menggunakan "Tes Dua Puluh Pernyataan" (The Twenty Statement Test atau TST) dalam upaya mentransformasikan konsep-konsep interaksi simbolik ke dalam variabel-variabel yang mungkin berguna dalam menghasilkan dan menguji preposisi-presposisi empirik. Pendekatan Kuhn ini, yang teorinya lazim disebut "teori diri" (*self theory*) dianggap menyimpang dari arus utama (interaksi simbolik mazhab Chicago) yang dikembangkan oleh Mead, Blumer, Goffman dan ilmuwan-ilmuwan interpretivis lainnya.

Ini berarti Blumer menolak gerakan menuju determinisme kolektif. Ia melukiskan kehidupan kelompok sebagai proses transaksi formatif, ia melihat norma-norma kelompok, posisi status dan hubungan peran hanya sebagai kerangka yang di dalamnya berlangsung tindakan sosial dan bukan determinan penting dalam memaksa bagi tindakan tersebut. (Mulyana, 2001)

Para ahli interaksi simbolik memperhatikan interaksi manusia sebagai tujuan sentral ilmu pengetahuan sosial. Observasi tindakan sosial, deskripsi dan definisi ulang elemen-elemen ini seharusnya dicapai. Salah satu tujuan ahli interaksi simbolik, yakni memisahkan dan mendeskripsikan secara hati-hati konsep-konsep sentral, seperti konflik, pengambilan peran kerja sama, penyelesaian masalah, pengulangan tindakan, situasi definisi, identitas, arah diri, simbol, objek sosial, penampilan, keadaan tenang dan sebagainya. Dan inilah sebagian besar yang

dipresentasikan oleh para tersangka dan pelaku tindak pidana korupsi yang menjadi tahanan KPK.

Berdasarkan hal tersebut, tampaknya penting untuk melihat satu per satu konsep tersebut dalam sejumlah situasi, membandingkan dan membedakan contohnya, memperjelas, mendeskripsikan bagaimana peran konsep-konsep tersebut dalam sejumlah situasi. Terutama situasi yang dihadapi mantan politisi itu, yang konsep dirinya terhadap situasi dan permasalahan yang mereka hadapi boleh jadi berbeda satu sama lain, tetapi perspektif mereka dalam menghadapi situasi itu seolah sama.

Prinsip-prinsip lain yang digunakan oleh ahli interaksi simbolik dalam riset ilmiah adalah mendeskripsikan objek dalam setting nyata, yakni bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain dan dirinya sendiri dalam situasi yang harus dilalui. Deskripsi semacam ini tidak impresionistik, namun dibuat sehati-hati, se-kritis, se-sistematis, dan seobjektif mungkin. Di samping itu juga ada kesempatan untuk mendiskusikan riset tersebut secara terus-menerus dengan ilmuwan lain. Termasuk menjadikan penelitian ini berkelanjutan sehingga gambaran diri politisi yang menjadi tersangka korupsi di KPK dan segala tindakan yang mereka lakukan pasca diakhirinya peran politik menjadi pesakitan dapat juga menjadi satu kajian sendiri dalam psikologi komunikasi misalnya.

Para ahli interaksi simbolik berpendapat bahwa tindakan ada dua macam, yaitu tindakan nyata dan tersembunyi. Tindakan tersembunyi berarti memasuki pikiran manusia. ini berarti berusaha mengerti tingkah laku di mana orang mendefinisikan situasi aktual, bagaimana mengembangkan, menggunakan dan mengubah perspektif, mengambil peran, memecahkan masalah, berbicara dengan diri sendiri dan memutuskan sesuatu berdasarkan garis tindakan. Untuk mengerti tindakan tersembunyi berarti kita perlu mempelajari pikiran sebagai tindakan daripada pikiran sebagai isi. Bagi seorang ilmuwan itu sendiri, untuk mengerti sesuatu, maka diperlukan kemampuan menempatkan diri sendiri pada posisi individu atau kelompok (Blumer, 1969).

Tampaknya interaksi simbolik memiliki perspektif dan metodologik yang jelas, menghendaki arah yang berbeda, seperti yang disimpulkan oleh Blumer (1969) bahwa interaksi simbolik percaya bahwa pengertian konsep-konsep masalah, teknik-teknik, riset dan skema-skema teoritikal seharusnya dilaksanakan dengan mempelajari dunia sosial secara empiris-aktual, Bagi interaksionisme simbolik, alam

sosial empiris harus menjadi penemuan-penemuan yang harus diganti dengan tugas penyelidikan yang langsung dan hati-hati dari kerja itu.

Dramatisasi simbol yang seringkali dilakukan dan dipertunjukkan oleh mantan politisi sebagai aktor pesakitan di KPK seringkali mengundang gelengan kepala dan sekaligus mengundang komentar dan pertanyaan publik. Sebuah analogi bagaimana simbol digunakan untuk kepentingan pencitraan dan reputasi individu. Mead mengemukakan: "Cara manusia mengartikan dunia dan dirinya sendiri berkaitan erat dengan masyarakatnya. Mead melihat pikiran (*mind*) dan dirinya (*self*) menjadi bagian dari perilaku manusia yaitu bagian interaksinya dengan orang lain." Bahkan menurut Mead: "Sebelum seseorang bertindak, ia membayangkan dirinya dalam posisi orang lain dengan harapan-harapan orang lain dan mencoba memahami apa yang diharapkan orang itu. Barangkali karena itu juga maka kebanyakan tahanan KPK itu berusaha mendramatisasi simbol yang mereka kenakan sebagai tahanan misalnya saat Miranda Goeltom mengenakan jaket tahanan tapi dengan kerah yang diangkat tinggi.

Intinya, Hanya dengan menyeraskan diri dengan harapan-harapan orang lain, maka interaksi menjadi mungkin. Semakin mampu seseorang mengambil alih, atau membatinkan perasaan-perasaan sosial semakin terbentuk identitas atau kediriannya. Karena itulah lewat pendekatannya terhadap interaksi sosial, Goffman sering dianggap sebagai salah satu penafsir "teori diri" dari Mead sangat menekankan sifat simbolik dari manusia. (Mulyana, 2001).

Pengaruh konsep diri individu dan defenisinya dalam presentasi dirinya mengenai situasi, gaya dan pada perilaku serta interaksi merupakan salah satu tema pokok dalam perspektif dramaturgis. Model analisa utama Goffman dalam dramaturgisnya menurut Doyle (1986) adalah masalah utama yang dihadapi individu dalam pelbagai hubungan sosialnya adalah mengontrol kesan-kesan yang diberikannya pada orang lain. Pada akhirnya individu berusaha mengontrol penampilannya, keadaan fisiknya dimana mereka memainkan perannya serta perilaku perannya yang aktual dan gerak isyarat yang menyertainya.

Perhatian individu terhadap pengaturan kesan (*impression management*) tidak terbatas pada perilakunya yang nyata saja, penampilan individu dan perilakunya yang umum juga sangat relevan untuk identitasnya. Usaha yang berhubungan dengan pengaturan kesan mungkin dilihat sebagai usaha

untuk mengontrol definisi situasi yang umum karena identitas individu sangat erat hubungannya dengan definisi sosial tentang situasi dimana mereka terlibat. Jadi, pusat perhatian Goffman adalah terutama pada tingkat kenyataan sosial mikro, tulisan Goffman juga menyajikan banyak contoh menarik mengenai seluk beluk proses interaksi dalam berbagai situasi.

Goffman merupakan ahli teori yang sangat memperhatikan analisis interaksi manusia. Goffman menganggap individu (bukan struktur yang lebih besar) sebagai satuan analisis. Untuk menjelaskan tindakan manusia, Goffman memakai analogi drama dan teater, hal itulah yang menjadikannya sebagai seorang dramaturgis. (Goffman, 1959) menyediakan dasar teori mengenai bagaimana individu tampil di dalam dunia sosial dan kerangka ini terus dipakai Goffman dalam banyak karya lain yang dihasilkannya kemudian.

Namun demikian, Goffman tidak memusatkan perhatiannya pada struktur sosial, dia lebih tertarik pada interaksi tatap muka atau kehadiran bersama. (*co-presence*), menurut Goffmann (1959) biasanya terdapat suatu arena kegiatan yang terdiri dari serangkaian kegiatan individu-individu yang saling mempengaruhi tindakan mereka satu sama lain ketika masing-masing berhadapan secara fisik. Para aktor adalah mereka yang melakukan tindakan-tindakan atau penampilan rutin.

Dalam membahas pertunjukan inilah Goffman melihat bahwa individu dapat menyajikan suatu pertunjukan (*show*) bagi orang lain, tetapi kesan (*impression*) si pelaku terhadap pertunjukan itu biasanya berbeda-beda. Seorang bisa sangat yakin terhadap tindakan yang diperlihatkannya, tetapi dapat pula bersikap sinis terhadap pertunjukan itu. lebih lanjut, menurut perspektif dramaturgi Goffman (1959, 1963, 1967) dalam teori interaksi simbolik dari George Herbert Mead, menyatakan bahwa (1) Manusia belajar memainkan berbagai peran dan mengasumsikan identitas yang relevan dengan peran-peran ini, menunjukkan satu sama lainnya siapa dan apa mereka, serta mendefinisikan situasi-situasi yang mereka masuki dan perilaku-perilaku pun berlangsung dalam konteks identitas sosial, makna dan definisi situasi tersebut. (2) Ketika manusia berinteraksi dengan sesamanya ia ingin mengelola kesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain terhadapnya. Untuk itu setiap orang melakukan "pertunjukan" bagi orang lain, kehidupan bagaikan teater dan aktor adalah pemainnya (Mulyana, 2001). Bahwa dramaturgi adalah suatu kajian tentang bagaimana

segala sesuatu dilakukan bukan mengapa segala sesuatu dilakukan.

Deutscher (1973) mengatakan bahwa kaum fenomenologi memahami tingkah laku manusia menurut kerangka acuan dari sang pelaku itu sendiri. Karena itulah maka menjadi penting bagi kaum fenomenologis untuk meneliti bagaimana dunia ini dihayati berdasarkan pemikiran-pemikiran bahwa realitas terpenting adalah bagaimana manusia melukiskan atau menghayati dunianya, oleh sebab itu pula maka kaum fenomenologis dalam mendekati persoalan dan mencari jawaban menuntut jenis riset dan metodologi yang berbeda.

Kemampuan menyerap dan mengungkapkan perasaan-perasaan, motif-motif dan pemikiran yang ada dibalik tindakan mantan politisi yang menjadi tersangka di KPK itu, termasuk motif apa yang menarik mereka ke dalam pusaran korupsi, apakah karena ketidaktahuannya untuk menempatkan posisinya, yang justru tidak membela kepentingan rakyat, individu, kelompok partai dan sebagainya, juga menjadi titik sentral untuk mengetahui motif sang pesakitan. Termasuk bagaimana mengembalikan fungsi dan peran mereka di mata keluarga sesuai dengan kapasitas peran yang harus dihayatinya termasuk bagaimana dia memaknakan peran itu sesuai dengan standar penilaian pribadinya yang telah terbelenggu kebebasannya. (1) Perspektif interaksi; Menempatkan kekuatan-kekuatan yang menentukan kelakuan manusia sebagai berada di luar individu, yang mengimbangkan sesuatu dengan yang lain dan saling hubungan sebab-akibat. Kekuatan tersebut adalah kedudukan sosial dan ekonomi, peran sosial, tuntutan kelompok, ketentuan larangan budaya, kebiasaan dan hukum. (2) Perspektif transaksi tentang dirasakan, dan apa yang dilakukannya, timbul dari makna yang diberikan orang kepada hal-hal fisik. Sosial dan hal-hal yang abstrak, makna diturunkan melalui transaksi yang dimiliki orang dengan sesamanya.

Dalam kapasitas aktor politik itulah maka menjadi menarik jika apa yang dinyatakan Goffman (1959) digunakan untuk menganalisis peran politisi, misalnya seorang pelaku harus berhasil memainkan suatu karakter. Bila terjadi krisis atau situasi gawat, "demi menyelamatkan pertunjukan" dia harus memiliki atribut-atribut tertentu. Yang dapat dipakai si pelaku untuk menghindari kesulitan adalah: (1) Langkah bertahan yang diambil si pelaku untuk menjamin kelangsungan pertunjukannya. (2) Langkah yang diambil oleh penonton dan pihak lain untuk membantu si pelaku menjamin kelangsungan pertunjuk-

annya. (3) Langkah-langkah yang harus diambil si pelaku untuk memungkinkan para penonton dan pihak lain untuk mengambil langkah-langkah pencegahan demi kepentingan si pelaku sendiri.

Kesetiaan, disiplin dan kewaspadaan merupakan tiga atribut esensial untuk suksesnya suatu tim. "kesetiaan dramaturgis" yang berarti merupakan kewajiban moral untuk mendukung pelaksanaan peran. "disiplin dramaturgis" yang berarti selalu berpegang pada bagian yang telah ditetapkan dan tidak terpengaruh oleh pertunjukan sendiri dan "kewaspadaan dramaturgis" yang berarti menggunakan metode yang tepat untuk menyajikan pertunjukan sesuai dengan skenarionya.

Wallace dan Wolf (1996) yang mengemukakan bahwa dramaturgi adalah sebuah pendekatan teoritis berkenaan dengan kehidupan orang bertindak dalam peranannya. Dimana kehidupan keseharian itu merupakan panggung kehidupan. Oleh karena tindakan manusia secara sosial adalah interaktif, maka setiap tindakan sosial interaksi manusia setidaknya dapat dianalisis berdasarkan: Orang-orangnya, hubungannya, penempatan dirinya, pola penampilannya, dan keadaan selebratif sosialnya. Oleh karena itu pula maka menurut analisis dramaturgi, interaksi komunikatif merupakan analisis terhadap penampilan yang secara sengaja mempergunakan arti faktual dalam komunikasi (terutama interpersonal), yang menentukan persepsi pengelolaan kesan dalam komunikasi. Hal ini merupakan sebuah proses dimana komunikator dalam tindakannya sebagai persona stimuli bertindak sebagai subjek dan objek sekaligus.

Model dramaturgi menempatkan individu dan perilaku sosial dalam analogi dramatis yang menandai aktor sosial pada panggung kehidupan yang sebenarnya. Goffman memandang perilaku ekspresif sebagai suatu penyajian diri ke hadapan pandangan masyarakat sebagai upaya untuk menonjolkan "peran" atau "watak" sebagai suatu diri yang dimanipulasikan. Perilaku bukan umum berada "di belakang layar," sama sekali berbeda dari apa yang disajikan untuk umum. Dikaitkan dengan teori itu, bahwa ketika para mantan politisi berinteraksi dengan sesama tahanan, dengan media dan dengan orang-orang yang berkomunikasi dengan mereka, terjadi sebuah pengelolaan kesan yang diharapkan tumbuh utamanya oleh orang lain terhadap presentasi diri mereka tersebut.

Implikasi Manajerial

Penelitian ini sejatinya mampu memberikan implikasi bagi lembaga terkait untuk menata dan menempatkan siapapun yang dalam posisi tersangka dan atau dirinya melekat sebuah stigma untuk bisa diperlakukan adil dibandingkan dengan apa yang dialami oleh mereka yang menyandang status yang sama tetapi mereka bukanlah dari kalangan elit. Sehingga model keadilan dan persamaan dimuka hukum bisa diterapkan secara adil dan berkeadilan. Sesuai dengan kapasitas diri siapapun yang berhadapan dengan proses peradilan. Dan ditetapkan status hukumnya.

Kesimpulan

Bahwa aib atau stigma organisasi partai politik yang merupakan efek dari ditetapkannya status tersangka atas kader dan atau elit partainya sedikit banyak akan dapat mendegradasi partai, di sisi lain presentasi diri para mantan politisi yang telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa yang selalu tampil sumringah adalah salah satu upaya bagi mereka untuk menjelaskan ke publik bahwa mereka mampu mengelola kesan atas penampilan mereka terlepas dari rumit dan peliknya masalah yang mereka hadapi tetapi sesungguhnya mereka hanya sekedar menampilkan perilaku yang di idealisir sedemikian rupa dimana dibalik semua itu mereka menginginkan sikap positif Atas status yang tengah mereka sandang atau sekedar menghibur diri dari perubahan status yang sebenarnya tidak pernah mereka inginkan.

Referensi

- Acemoglu, D., & Verdier, T. (2000). The choice between market failures and corruption. *American Economic Review*. Vol. 90. No. 1
- Blumer, Hermert (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. New Jersey: Prentice-Hall, Inc
- Dahlström, Carl. et.al. (2012). The Merit of Meritocratization: Politics, Bureaucracy, and the Institutional Deterrents of Corruption. *Political Research Quarterly*. Vol. 65, No. 3, pp. 656-668.
- Downey, Brant. (2015) The Looking Glass Self and Deliberation Bias in Qualitative Interviews. *Sociological Spectrum*. Vol. 35, No. 6, pp. 534-551.
- Doyle, W. (1986). Liberalism And World Politics. *The American Political Science Review*. Vol. 80, No. 4, pp. 1151-1169.

- Deutscher, Irwin. (1973). *What We Say/What We Do: Sentiment and Acts*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman.
- Goel, R. K., & Nelson, M. A. (2010). Causes of corruption: History, geography and government. *Journal of Policy Modeling*, Vol. 32.
- Goffman, Erving. (1959) *The Presentation of Self in Everyday Life*. New York: Doubleday Anchor
- (1963). *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. Englewood Cliffs. NJ: Prentice Hall.
- (1966). *Behavior in Public Places: Notes on the Social Organization of Gatherings*. New York: The Free Press
- Lalountas, Dionisios A. et.al. (2011). Corruption, globalization and development: How are these three phenomena related? *Journal of Policy Modeling*. Vol. 33, pp. 636-648.
- Leary, Mark R. & Ashley Batts Allen. (2011). Personality and Persona: Personality Processes in Self-Presentation. *Journal of Personality*. Vol. 79 No. 6, pp. 889-916.
- Lindlof, T.R.(1995). *Qualitative Communication Research Methods (Current Communication series)*. Fifth printing. Thousand Oaks, CA : Sage Publications, Inc
- Morley, Michael (2002). *How to Manage Your Global Reputation*. New York : Palgrave
- Mulyana, Deddy. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Pippidi, Alina Mungiu. (2013). Controlling Corruption Thourgh Collective Action. *Journal of Democracy*. Vol. 24, No. 1, pp. 101-11.
- Rock, MT. (2009) Corruption and democracy. *Journal of Development Studies*. Vol. 45, No. 1, pp 55-75.
- Salinas-Jiménez, M. M., & Salinas-Jiménez, J. (2007). Corruption, efficiency and productivity in OECD countries. *Journal of Policy Modeling*, Vol. 29
- Stockemer, Daniel. (2011). Bribes and ballots: The impact of corruption on voter turnout in democracies. *International Political Science Review*. Vol. 34. No. 1, pp. 74-90.

- Sung, H-E. (2004). Democracy and political corruption: A cross-national comparison. *Crime, Law and Social Change*. Vol. 41, No. 1. pp. 179–94.
- Suprpto, Riyadi. (2002). *Interaksi Simbolik; Perspektif Sosiologi Modern*. Malang : Averrous Press.
- Vos, M.F. (1992). *The Corporate Image Concept, A Strategic Approach*. Nederland : Utrech Lemma.
- Wallace, R.A., & Wolf A. (1986). *Contemporary Sociology Theory: Countinuing The Classical Tradition*. New York : Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs.

